

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SIPATANA KABUPATEN
POHUWATO**

OLEH

**DEBI GAYATRI TORADJA
NIM : E21.19.211**

SKRIPSI



Untuk memenuhi Syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SIPATANA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh


DEBI GAYATRI TORADJA

E2119211

S K R I P S I


**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dan telah disetujui
oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 16 Juni 2022**

PEMBIMBING I



TAMSIR, SE., MM
NIDN.0920057403

PEMBIMBING II



MUHAMMAD ANAS, SE., MM
NIDN.0920057402

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SIPATANA KABUPATEN POHUWATO

OLEH:

DEBI GAYATRI TORADJA

E2119211

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Sulaiman, SE., MM**
(Ketua Penguji)
2. **Ng. Syamsiah B, SE., MM**
(Anggota Penguji)
3. **Haris Hasan, SE., MM**
(Anggota Penguji)
4. **Tamsir, SE., MM**
(Pembimbing Utama)
5. **Muhammad Anas, SE., MM**
(Pembimbing Pendamping)

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. MUSAFIR, SE., M.Si
NIDN: 0928116901

SYAMSUL, SE., M.Si
NIDN: 0921108502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*”Janganlah Kmu Melihat Hasil Akhir Tetapi Lihatlah
Perjalananmu Menuju Hasil Akhir Itu”*

*Manusia Asalnya Dari Tanah, Makan Dari Hasil Tanah,
Berdiri di Atas Tanah, Akan Kembali Ke Tanah,
Kenapa Masih Bersifat LAngit ?”
(Hamka)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Adalah Persembahan Kecil Saya, Untuk Kedua
Orang Tua Saya, Ketika Dunia Menutup Pintunya Kepada
Saya, Ayah dan Ibu Membuka Lengannya Untuk Saya,
Mereka Membuka Kedua Hati Untuk Saya.*

Tak Lupa Pula Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBAH ILMU
2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 16 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Debi Gayatri Toradja
NIM: E2119211

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan. usulan penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato”**. Skripsi ini disusun sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa semua ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan serta do'a dari kedua orang tua saya dan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada Bapak Tamsir .SE.,MM selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Anas.,SE.,MM selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada:

- Ibu Dr. Juriko Abdussamad selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
- Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr.H. Abdul Gaffar Latjokke.M.Si
- Bapak Dr.Musafir.SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- Bapak Syamsul Nani.SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen
- Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Gorontalo,.....2022

Debi Gayatri Toradja
Nim: E21. 19.211

ABSTRAK

DEBI GAYATRI TORDJA. E2119211. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SIPATANA KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kepala keluarga baik secara simultan maupun secara parsial. Metode Analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan mengolah data sekunder penelitian yang bersumber dari laporan Penerimaan PBB, PDRB perkapita, dan data jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan maupun parsial pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PBB di desa sipatana.

Kata kunci: pajak bumi dan bangunan (PBB), PDRB perkapita, kepala keluarga

ABTRACT

DEBI GAYATRI TORDJA. E2119211. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LAND AND BUILDING TAX IN SIPATANA VILLAGE, POHUWATO REGENCY

The purpose of this study is to determine the effect of GRDP per capita and the number of household heads, either simultaneously or partially. The research analysis method used in this study is multiple linear regression by processing secondary research data sourced from reports on land and building tax revenue, DRDP per capita, and data on the number of family heads. The results indicate that simultaneously or partially the effect of GRDP per capita and the number of family heads contribute a positive but insignificant effect on the land and building tax revenue in Sipatana village.

Keywords: land and building tax, GRDP per capita, family heads

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penerimaan Pemerintah.....	9
2.2. Pajak dan Pajak Daerah.....	10
2.2.1 Definisi Pajak	10
2.2.2 Pajak Daerah	11

2.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	12
2.2.4 Sistem Pemungutan, Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah	13
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15
2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
2.4.1 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.5 Keluarga	22
2.6 Kerangka Pikir	23
2.7 Hipotesis.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Objek penelitian	25
3.2. Metode penelitian.....	25
3.2.1. Desain Penelitian.....	26
3.3. Teknik pengumpulan data	26
3.3.1. Penelitian Kepustakaan	26
3.3.2. Penelitian Lapangan	26
3.4. Jenis dan Sumber Data	27
3.4.1. Jenis Data	27
3.4.2. Sumber Data.....	27
3.5. Definisi Operasional Variabel	27
3.7 .Metode Analisis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	31

4.2. Hasil Analisis Data.....	35
4.2.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	36
4.2.2. Koefisien Determinasi.....	37
4.2.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	38
4.2.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	40
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sipatana Tahun 2015-2021	31
Tabel 4.2. Jumlah Kepala Keluarga Desa Sipatana Tahun 2015-2021	33
Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2021	34
Tabel 4.4. Standar Deviasi Rata-rata dan Observasi	35
Tabel 4.5. Coefficients	36
Tabel 4.6. Koefisien Determanasi	37
Tabel 4.7. Hasil Uji-t Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita.	38
Tabel 4.8. Hasil Uji-t Jumlah Kepala Keluarga	39
Tabel 4.9. Hasil Regresi Uji-F	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Jadwal Penelitian
2. Lampiran 2 Abstrak Indonesia
3. Lampiran 3 Abstrak Inggris
4. Lampiran 4 Olahan Data SPSS
5. Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
6. Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian
7. Lampiran 7 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi
8. Lampiran 8 Hasil Turnitin
9. Lampiran 9 Curriculum Vitae

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang utama bagi suatu Negara. Berdasarkan sifatnya, maka pajak bersifat memaksa dan wajib dibayarkan demi pembangunan suatu bangsa demi kemakmuran rakyat berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, salah satu contoh dari hasil pungutan pajak tersebut yaitu dengan adanya fasilitas yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah Desa bersumber dari hasil pendapatan pajak.

Berbagai cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya dengan melalui penghasilan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan sebagai pendapatan untuk negara yang cukup potensial dan sumbangan dalam pendapatan daerah. Stategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruhnya bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak yang dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan soisal ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut.

Pada umumnya pungutan pajak yang diberlakukan di Negara Indonesia, terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pajak yang diberlakukan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang dikelola dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekalipun kedudukannya sebagai Pajak Negara, hal ini berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi, maka diwajibkan untuk dibayar pajaknya kepada negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semua kabupaten dan kota di Negara Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan. Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

Dalam meningkatkan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya khususnya membagi hasil pajak dan bukan pajak telah mendekati hasil yang di harapkan. PBB dan PPh, bagian yang cukup besar

dari hasil pajak pusat. Maka sesuai Direktur Jenderal Lembaga Departemen Keuangan tanggal 4 juni 2001, bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari suatu pelayanan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat memang dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65 persen dan 35 persen dibagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten (Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000).

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penghasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65% dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65% dan 35% di bagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini merupakan pajak objektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair*

(sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur). fungsi *budgetair* adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *reguland* adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan kedua fungsi ini, menunjukkan bahwa pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2003).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo, luas wilayahnya 4.244,31km dengan jumlah 128.748 jiwa dan terdiri dari 13 Kecamatan 79 desa. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato sebesar 38,888,554,935, pendapatan pajak daerah 7,475,343,870 dan retribusi daerah 6,862,163,273. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato). Desa Sipatana adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Buntulia pada tahun 2015 mendapatkan bagi hasil retribusi dari daerah sebesar 7,460,910 pada tahun 2016.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu diperhatikan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, jumlah Kepala Keluarga dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Laju inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Jumlah kepala keluarga merupakan banyaknya kepala keluarga yang tinggal di wilayah tertentu (Sariana, 2007). Jumlah kepala keluarga sedikit juga banyak mencerminkan kepemilikan tanah dan bangunan di suatu wilayah yang dapat diartikan sebagai wajib pajak.

Desa Sipatana merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Duhiadaa dan mendapatkan hasil penerimaan dari daerah yang masih kurang dari daerah dikarenakan kurang maksimalnya pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan desa-desa yang lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah

Kabupaten Pohuwato harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di pedesaan khususnya di Desa Sipatana, sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut bisa mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya sesuai target yang ditentukan.

Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi, Risyandi (2018) dengan judul penelitian *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh Tahun 2000-2017*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, laju inflasi dan jumlah kepala keluarga terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari tahun 2000-2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pengolahan data menggunakan software SPSS. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai F-statistik ($66.504 > F\text{-tabel } (3,16)$) artinya variabel bebas yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, laju inflasi dan jumlah kepala keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui uji-t secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, jumlah kepala keluarga mempunyai pengaruh signifikan Sedangkan variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Payakumbuh. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted *R-Square* sebesar 0,934 ini berarti Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) perkapita, laju Inflasi dan jumlah kepala keluarga sebesar 93.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
2. Apakah Jumlah Kepala Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Jumlah Kepala Keluarga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

2. Untuk mengetahui jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
3. Untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa terutama aparat badan pengelolaan keuangan Desa Sipatana dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan dan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dan kajian yang sama

4. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan bagi penulis tentang tatacara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang luas yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Sumber-sumber penerimaan pemerintah menurut (Suparmoko ,2000) dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pajak

Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat di tunjuk

b. Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara

Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Negara.

d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah

e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu

f. Pencetakan Uang Kertas.

Karena fungsi dan sifatnya maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang atau meminta kepada Bank Sentral guna memberi pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa ada agunan.

g. Hasil dari Undian Negara.

Dengan undian Negara pemerintah akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dijual dengan semua pengeluaran-pengeluaran termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian Negara tersebut.

h. Pinjaman

Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

i. Hadiah.

Sumber dana dan jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberi hadiah kepada pemerintah daerah.

2.2 Pajak dan Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Herschel, dan Horace dalam Zain (2008:11) bahwa “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah menurut Raharjo (2009 : 72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pajak Daerah menurut Siahaan (2010 : 7) bahwa adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

2.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak

- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana berikut:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah
- c. Dipungut oleh pemungut pajak

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang

bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kelanjutan dan penggantian nama dari pajak daerah (Iuran Pembangunan Daerah) yang ditetapkan berdasarkan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang di rubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak ini dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Tanah yang mempunyai arti ekonomis, politis dan sosial menyebabkan orang mempunyai kecenderungan untuk memilikinya, sedangkan bangunan mempunyai arti khusus yang unik terutama lokasinya yang tetap, pemanfaatannya jangka panjang, mempunyai aspek kenyamanan dan strata sosial serta aksesnya pada fasilitas umum yang disediakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan individu melalui kebebasan dalam berkonsumsi dan menabung, salah satu bentuknya adalah memperoleh kepuasan yang maksimal melalui kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah setiap orang atau badan yang secara sah mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penjumlahan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu (setahun). Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar ditentukan oleh tiga faktor yaitu Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

- a. Tarif pajak ditentukan sebesar 0,5 %.
- b. NJOP bumi (tanah) dan bangunan dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) pendekatan perbandingan harga dengan obyek lain, yaitu penentuan NJOP dengan cara membandingkan harga obyek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya;
- 2) pendekatan nilai perolehan baru, yaitu penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi obyek tersebut;
- 3) pendekatan nilai jual pengganti, yaitu penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.

C. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebesar 20% dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Untuk pajak bangunan diberlakukan semacam keringanan yang disebut Batas Nilai Bangunan Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak sebesar Rp 8.000.000,00 Artinya, bagi setiap wajib pajak yang nilai bangunannya sama atau kurang dari Rp 8.000.000,00 tidak dikenakan pajak atas bangunannya. Rumus baku penentuan besarnya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

$$PBB = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

(Soemitro, et. al, 2001: 23)

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan

nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar. (BPS, 2012).

Menurut Todaro (2002) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.4.1. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Metode Langsung

A. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q1, Q2, Q3, dan Qn = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

P1, P2, P3, dan Pn = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

B. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor *rent* terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
- b. Keuntungan perusahaan (*corporate profit*) yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profit taxes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

- c. Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*) yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, misalnya petani, *self employed profesional*, dan lain-lain. dengan perkataan lain *proprietors income* merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, *rental business* dan *residential properties*, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis *real estate* : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang *non form* yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan *royalties* yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk di dalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

C. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

2. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan

daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan di atas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

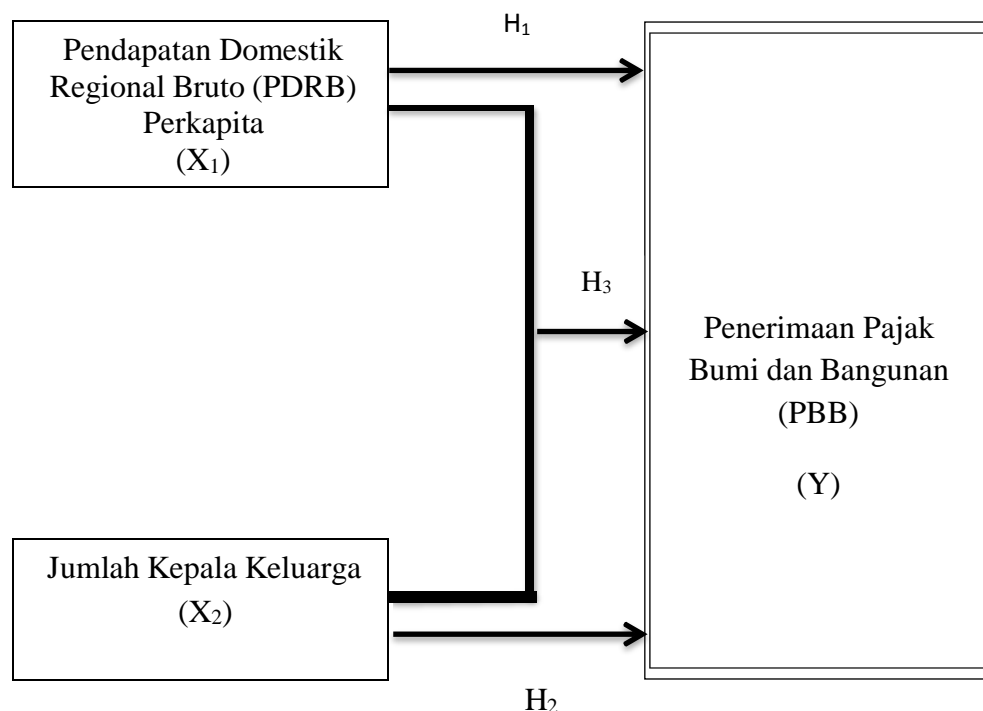
2.5. Keluarga

Keberadaan sebuah keluarga tidak dapat terpisahkan dengan perkawinan. Soemanto (2002 : 17) menyatakan bahwa “keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak”. Lebih lanjut, keluarga dinyatakan sebagai “satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi (pengambilan) anak angkat”. Secara umum, hubungan-hubungan sosial keluarga didasarkan atas ikatan perasaan dan batin yang kuat serta orang tua berperan mengawasi dan memotivasi pengembangan tanggungjawab sosial dalam keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut, keluarga juga dapat didefinisikan sebagai “sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap (rumah)” (Soemanto, 2002:17). Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai perannya masing-masing, misalnya sebagai suami, istri, ayah,

ibu, anak laki-laki, anak perempuan, serta kakak atau adik laki-laki atau perempuan.

2.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan dasar teori yang telah dikemukakan bahwa untuk dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan kreativitas daerah untuk dapat menggali potensi yang dimiliki salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kerangka pikir pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.7. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir pada penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
2. Jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah kepala keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan variabel independennya yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah kepala keluarga di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:38) "Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sedangkan Sugiyono (2012) menerangkan "Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid". Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan pengolahan data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan desainnya adalah rencana atau Rancangan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka atau uraian. Data-data sekunder yang diperlukan antara lain literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan lain- lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.2.1. Desain Penelitian

Adapun desain dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti guna untuk membuktikan hipotesis yang telah disusun, maka diteliti variabel-variabel yang terkait. Variabel-variabel tersebut yaitu variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan variabel indevendennya adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah kepala keluarga di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

3.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

3.3.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan literatur-literatur baik itu buku-buku, majalah-majalah, maupun buletin-buletin yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

3.3.2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Metode Ilmiah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder secara langsung dari sumbernya dengan cara mengumpulkan hasil dari semua data yang di dapatkan dari kantor, kemudian data-data tersebut di jadikan sebagai input dalam penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka atau uraian. Data-data sekunder yang diperlukan yaitu jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Jumlah Kepala Keluarga.

3.4.2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta- fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Pada penelitian ini data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa batasan dan

pengertian dasar/konsep operasional dan variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.
2. Jumlah kepala keluarga merupakan banyaknya kepala keluarga yang tinggal di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato. Jumlah kepala keluarga mencerminkan kepemilikan tanah dan bangunan di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato yang dapat diartikan sebagai wajib pajak.
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang penerimaannya di hitung dalam satuan rupiah pada Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato

3.6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas jumlah Produk Domestik Bruto (PDRB) Perkapita dan Jumlah Kepala Keluarga sedangkan variabel terikat adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini secara umum dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X1 = Produk Domistik Bruto Perkapita

X_2 = Jumlah Kepala Keluarga

b = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error/Disturbance

Sedangkan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis baik melalui uji t maupun uji F.

1. Uji Statistik t

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah sampel

r = Koefisien korelasi

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima, maka nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.

2. Uji Statistik F

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

dimana:

R = Nilai koefisien korelasi

k = Jumlah variabel bebas (independen)

n = Jumlah sampel

F_{hitung} = Nilai F yang dihitung

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima, maka nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel . Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sebaliknya jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam menganalisis variabel pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif yaitu menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Produk Domestik Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah kepala keluarga, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Di bawah ini, data jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2021.

Tabel 4.1.

**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sipatana
Tahun 2015-2021**

N0	Tahun	PBB
1	2015	Rp.13.449.943
2	2016	Rp. 14.132.212
3	2017	Rp.6.317.963
4	2018	Rp.13.100.602
5	2019	Rp.13.211.276
6	2020	Rp.8.211.544
7	2021	Rp. 12.841.255

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana selama kurun waktu 7 (Tujuh) tahun terakhir mengalami penerimaan yang sangat bervariasi. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana sebesar Rp. Rp.13.449.943. Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 14.132.212 dan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.6.317.963 di tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.100.602 dan 2019 sebesar Rp. 13.211.276 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp. Rp.8.211.544 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp. 12.841.255. Hal ini disebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan semakin baik. Namun pada tahun 2017 dan 2020 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato menurun, Bervariasinya tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato ini membuktikan bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi (PBB) dan Bangunan di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaannya, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan juga Jumlah Kepala Keluarga. Adapun usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan terlihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak atau kepala keluarga di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.**Jumlah Kepala Keluarga Desa Sipatana Tahun 2015-2021**

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga
1	2015	393
2	2016	398
3	2017	398
4	2018	412
5	2019	423
6	2020	422
7	2021	425

Sumber :Pemerintah Desa Sipatana, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak atau kepala keluarga setiap tahunnya selama periode 2015-2021 di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato. Dimana jumlah wajib pajak pada tahun 2015 adalah 397 orang dan di tahun 2016 dan 2017 berjumlah 398, dan di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah 412, di tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 423, di tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 422 dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan jumlah 425 orang. Hal ini di karenakan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin membaik, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Untuk melihat peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato, maka dapat dilihat pada Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Pohuwato yang perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2021**

No	Tahun	PDRB
1	2015	3.107.938,88
2	2016	34.036.907,30
3	2017	3.078.279,07
4	2018	4.338.084,96
5	2019	4.610.486,26
6	2020	4.602.268,32
7	2021	4.703.613,13

Sumber : Badan Pusat Statistik,2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Pohuwato berfluktuasi, dimana pada tahun 2015 sebesar 31.107.938,88, atau mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 34.036.907,38, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34.036.907,30 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 4.338.084,96, dan juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4.610.486,26 dan berturut turut pada tahun 2020 dan 2021 meningkat sebesar 4.602.268,32 tahun 2020 dan 4.703.613,13 tahun 2021. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita atas dasar harga berlaku dan porsi terendah dari konsumsi lembaga non profit.

4.2. Hasil Analisis Data

Bagian ini penulis akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Jumlah Kepala keluarga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato yang akan dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang akan diolah melalui Program SPSS. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil akhirnya sebagai berikut :

Tabel 4.4

Standar Deviasi Rata-rata dan Observasi

	N	Std. Deviation
Penerimaan PBB	7	3044231.336
PDRB Perkapita	7	1.385
Jumlah Kepala Keluarga	7	13.656
Valid N (listwise)	7	

Sumber : Hasil Regresi (Data diolah Juni 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa rata-rata variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato selama kurun waktu 2015-2021 adalah 3044231.336. Untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (X_1) adalah 1.385 dan variabel Jumlah Kepala Keluarga (X_2) adalah 13.656 Dengan N dinyatakan jumlah observasi yang berjumlah 7 tahun.

4.2.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-5.807	4.413	
PDRB Perkapita	.226	.104	1.028
Jumlah Kepala Keluarga	16.575	10.274	.732

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -5.807 + 0.226X_1 + 16.575X_2 + \varepsilon$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar -5.807, nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah Kepala Keluarga sama dengan nol, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato sebesar -5.807.

b. Koefisien Regresi Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (X_1)

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (X_1) bernilai positif adalah 0.226.

Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (X_1) sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat sebesar 0.226.

c. Koefisien Regresi Variabel Jumlah Kepala Keluarga (X_2)

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa nilai variabel jumlah kepala keluarga (X_2) sebesar 16.575. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah satu satuan kepala keluarga (X_2) sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat sebesar 16.575.

4.2.2 Koefisien Determinasi

Tabel 4.6

**Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.313	2523397.972

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kepala Keluarga, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Sumber : Hasil olah data, 2022

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,542 memiliki makna bahwa 54,2% variasi naik turunnya variabel (Y) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mampu dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (X_1) dan Jumlah Kepala Keluarga (X_2) secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 45,8% dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti.

4.2.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H_1) dan hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) perkapita dan jumlah kepala keluarga (X_2) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) maka dilakukan uji-t. Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$), maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$), maka hipotesis penelitian ditolak. Adapun nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 5\%$.

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

H_1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Tabel 4.7

Hasil Uji-t Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1.316	.259
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita	2.175	.095
Jumlah Kepala Keluarga	1.548	.197

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} 2.175 Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,895 (t_{hitung} 2.175 > t_{tabel} 1,895) nilai t hitung menunjukkan angka positif, dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato, ditolak karena hasilnya menunjukkan nilai positif namun tidak signifikan.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

H_2 : Jumlah Kepala Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Tabel 4.8

**Hasil Uji-t Jumlah Kepala Keluarga
Coefficients^a**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1.316	.259
PDRB Perkapita	2.175	.095
Jumlah Kepala Keluarga	1.548	.197

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 1.548 Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,895 (t_{hitung} 1.548 < t_{tabel} 1,895) nilai t hitung menunjukkan angka positif, dengan nilai signifikansi sebesar 0.197 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato, ditolak karena hasil menunjukkan nilai positif namun tidak signifikan.

4.2.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis uji-F digunakan untuk melihat pengujian signifikansi koefisien regresi secara bersama-sama atau secara keseluruhan (*Testing The Overall Significance of Regression*). Pengujian hipotesis Uji-F dilihat melalui uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan tingkat signifikansi dengan (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi dari Uji-F dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9

**Hasil regresi Uji-F
ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.013	2	1.507	2.366	.210 ^a
Residual	2.547	4	6.368		
Total	5.560	6			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kepala Keluarga, PDRB Perkapita

b. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Sumber: Olahan Data, 2022

Pengujian terhadap hipotesis ketiga yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F.

H₃ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah kepala keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel di atas, nampak bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($2.366 > 3.79$) nilai F_{hitung} menunjukkan angka positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,210 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah kepala keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak bumi dan Bangunan di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato, ditolak karena hasilnya menunjukkan nilai positif namun tidak signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato
2. Jumlah Kepala Keluarga secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah kepala keluarga secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Agar kiranya Pemerintah Desa Sipatana proaktif untuk melakukan kerjasama dengan pihak perpajakan dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami betapa pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan dan juga untuk kesejahteraan mereka juga karena dengan adanya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak akan meningkatkan

penerimaan pajak baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak PPh dan lain-lain.

2. Agar kiranya Pemerintah Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato perlu melakukan strategi yang baik untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak masyarakatnya, salah satunya memberikan pelayanan yang maksimal dan perhatian khusus kepada warganya apalagi yang kurang mampu namun rajin membayar tepat waktu dengan cara memberikan bantuan.
3. Agar kiranya Pemerintah Desa Sipatana Kabupaten Pohuwato perlu mengecek setiap saat terhadap banyaknya atau besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan surat pemberitahuan (SPT) yang disetorkan dan memberikan teguran dan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2009. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi, Risyandi .2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh Tahun 2000-2017*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Arikunto, S. 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kementerian Keuangan.2016.*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited*
- Mardiasmo. 2011.*Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi.
- Rochmat Soemitro, et. al., 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, Edisi Pertama*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung, Alfabeta.
- _____,2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung, Alfabeta.
- Soemanto, 2002, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFE-Yogyakarta. Hal4,44-45.
- Supriyanto, Ali Muhson, 2007, *.Ekonomi*. Surakarta, CV Haka MJ.
- Suseno dan Siti Astiyah.2009. *Inflasi*. Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Todaro, Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang sistem pemungutan pajak Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

[illegible]

Lampiran 2

ABSTRAK

DEBI GAYATRI TORDJA. E2119211. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SIPATANA KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kepala keluarga baik secara simultan maupun secara parsial. Metode Analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan mengolah data sekunder penelitian yang bersumber dari laporan Penerimaan PBB, PDRB perkapita, dan data jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan maupun parsial pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PBB di desa sipatana.

Kata kunci: pajak bumi dan bangunan (PBB), PDRB perkapita, kepala keluarga



Lampiran 3

ABSTRACT

**DEBI GAYATRI TORDJA. E2119211. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING
LAND AND BUILDING TAX IN SIPATANA VILLAGE, POHUWATO REGENCY**

The purpose of this study is to determine the effect of GRDP per capita and the number of household heads, either simultaneously or partially. The research analysis method used in this study is multiple linear regression by processing secondary research data sourced from reports on land and building tax revenue, GRDP per capita, and data on the number of family heads. The results indicate that simultaneously or partially the effect of GRDP per capita and the number of family heads contribute a positive but insignificant effect on the land and building tax revenue in Sipatana village.

Keywords: land and building tax, GRDP per capita, family heads



Lampiran 4

Lampiran Hasil Olahan Data SPSS

Regression

Notes

Output Created		08-Jun-2022 08:35:20	
Comments			
Input	Active Dataset	DataSet0	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		7
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.	
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2.	
Resources	Processor Time		00:00:00.078
	Elapsed Time		00:00:00.105
	Memory Required		1628 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots		0 bytes

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Kepala		

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.313	2523397.972

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kepala Keluarga, PDRB Perkapita

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.013	2	1.507E13	2.366	.210 ^a
	Residual	2.547	4	6.368E12		
	Total	5.560	6			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kepala Keluarga, PDRB Perkapita

b. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.807	4.413		-1.316	.259
	PDRB Perkapita	.226	.104	1.028	2.175	.095
	Jumlah Kepala Keluarga	16.575	10.274	.732	1.548	.197

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Descriptive Statistics

	N	Std. Deviation
Penerimaan PBB	7	3044231.336
PDRB Perkapita	7	1.385
Jumlah Kepala Keluarga	7	13.656
Valid N (listwise)	-	

Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 19232/PIP/LEMLIT-UNISAN/VI/2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Desa Sipatana
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Debi Gayatri Toradja
NIM : E2119211
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sipatana Kecamatan Buntulia
Judul penelitian : Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pajak bumi dan bangunan di desa Sipatana kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 01 Juni 2022

Ketua,

DR. Rahmisyari, ST. SE. MM
NIDN : 0929117202

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN BUNTULIA
DESA SIPATANA

Jln. Sawah Besar Dusun Tanggilingo No Telp (0443)210.....

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 132/DSPT-BTLA/ 172 /VI/2022

Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Unniversitas Ichsan Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 30 Mei 2022 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan proposal/skripsi mahasiswa atas nama Deby Gayatri Toradja dengan judul, "Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 1 Bulan setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Sipatana, 24 Juni 2022

KEPALA DESA SIPATANA

AHIM LAKORO, SE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo, www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 161/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

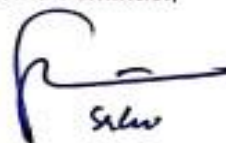
Nama Mahasiswa : Debi Gayatri Toradja
NIM : E2119211
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa
Sipatana Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 18 Juni 2022
Tim Verifikasi,


Selw

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database0%
- Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	4%
	Internet	
2	repository.utu.ac.id	3%
	Internet	
3	ejurnal.kependudukan.lipi.go.id	2%
	Internet	
4	text-id.123dok.com	2%
	Internet	
5	download.garuda.ristekdikti.go.id	2%
	Internet	
6	aktiva.nusaputra.ac.id	1%
	Internet	
7	journal2.um.ac.id	1%
	Internet	
8	positori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet	

9	Deden Edwar Yokeu Bernardin, Mega Muliawati Pertiwi. "Analisis Pote... Crossref	<1%
10	adoc.pub Internet	<1%
11	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet	<1%
12	eprints.ums.ac.id Internet	<1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
14	media.neliti.com Internet	<1%
15	pekalongankab.go.id Internet	<1%
16	repository.unja.ac.id Internet	<1%
17	123dok.com Internet	<1%
18	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
19	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id Internet	<1%
20	id.scribd.com Internet	<1%

21

id.123dok.com

Internet

<1%

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

I. Identitas Pribadi



Nama	: Debi Gayatri Toradja
NIM	: E21. 19. 211
Tempat/Tgl. Lahir	: Marisa, 04-07-2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Kawa Desa Sipatana Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

II. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan di SDN Inpres 1 Buntulia Kecamatan Duhiadaa pada tahun 2012
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Duhiadaa pada tahun 2015
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di Madrasah Aliyah Al Khairat Buntulia pada tahun 2018
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.